



**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA DAERAH
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP
PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2020-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 164 dan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Pemeriksa Daerah untuk memeriksa adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah;
- b. bahwa Tim Pemeriksa Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, memiliki keanggotaan yang berasal dari Unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan Unsur Masyarakat sesuai kebutuhan;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan DKPP tentang Pengangkatan Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada setiap Provinsi di seluruh Indonesia yang berasal dari Unsur KPU Provinsi, Unsur Bawaslu Provinsi dan Unsur Tokoh Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2014, Nomor 22 Tahun 2014, dan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Laksana Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1985);
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 252);
7. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-771/MK.02/2016 tanggal 13 September 2016 hal Honorarium Persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Honorarium Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif dan Pilpres dan Sengketa Pilkada;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-010.01.1.483005/2020 Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PENGANGKATAN KEANGGOTAAN TIM PEMERIKSA DAERAH PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PADA SETIAP PROVINSI DI SELURUH INDONESIA PERIODE 2020-2021;
- PERTAMA** : Mengangkat Keanggotaan Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada setiap Provinsi di seluruh Indonesia Masa Jabatan 1 April 2020 s.d. 31 Maret 2021, masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium Majelis Sidang;
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Daerah dibebankan pada DIPA Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2020 dan 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 April 2020

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Pt. KETUA,



Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020

TANGGAL : 1 April 2020

DAFTAR NAMA TIM PEMERIKSA DAERAH PERIODE 2020-2021

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
1.	Aceh	1. Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D 2. Dr. Muklir, S.Sos, M.AP	Masyarakat Masyarakat
		3. Muhammad, S.E., Ak., MSM. 4. Munawarsyah, S.H.I., M.A.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Marini, S.Pt 6. Faizah, SP	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
2.	Sumatera Utara	1. Nazir Salim Manik, S.Sos, MSP 2. Dr. Iskandar Zulkarnain	Masyarakat Masyarakat
		3. Hj. Ira Wirtati, S.Ag., M.Pd. 4. Mulia Banurea, S.Ag., M.Si.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Marwan, S.Ag 6. Henry Simon Sitinjak, SH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
3.	Sumatera Selatan	1. Andika Pranata Jaya, S,Sos, M.Si 2. Dr. Hj. Lishapsari Prihatini, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Amrah Muslimin, S.E., M.Si. 4. Hepriyadi, S.H., M.H.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Yenli Elmanoferi, SE., M.Si 6. Iwan Ardiansah, SH., MH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
4.	Sumatera Barat	1. Dr. Aermadepa, S.H., M.H 2. Drs. Muhammad Mufti Syarfie	Masyarakat Masyarakat
		3. Yanuk Sri Mulyani, S.H., M.Si. 4. Gebril Daulai, S.Pt., M.IKom.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Elly Yanti, SH 6. Vifner, SH,MH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
5.	Riau	1. Sri Rukmini, SH., M.Ikom 2. H. Abdul Hamid, S.Pi., M.Si	Masyarakat Masyarakat

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		3. Firdaus, S.H. 4. Nugroho Noto Susanto, S.IP.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. H. Amiruddin Sijaya, Spd., MM 6. Neil Antariksa, A. Md., SH., MH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
6.	Kepulauan Riau	1. Dr. Sumianti, S.Sos., MM., 2. Dr. Golan Hasan, SE, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Parlindungan Sihombing, S.Sos. 4. Sriwati, S.E., M.M.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Said Abdullah Dahlawi, ST 6. Indrawan Susilo Prabowoadi, SH, MHA	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
7.	Jambi	1. Nuraida Fitri Habi, S.Ag, M.Ag. 2. Dr. Ferdricka Nggeboe, SH, MH	Masyarakat Masyarakat
		3. Nur Kholik, S.Ag 4. Apnizal, S.Pt.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Wein Arifin, S.IP., M.IP 6. Afrizal, S.Pd.I., MH.	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
8.	Bangka Belitung	1. Sugesti, M.Pd 2. Bagong Susanto, SH	Masyarakat Masyarakat
		3. Guid Cardi, S.IP. 4. Pudjiarti, S.T.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Edi Irawan, S.Ag 6. Jafri, S.Pd., Si	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
9.	Bengkulu	1. Elfahmi Lubis, M.Pd 2. Heri Sunaryanto, Ph.D	Masyarakat Masyarakat
		3. Eko Sugianto, S.P., M.Si. 4. Darlinsyah, S.Pd., M.Si.	KPU Provinsi KPU Provinsi

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		5. Dodi Herwansyah, S.Pd., MM 6. Patimah Siregar, M.Pd	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
10.	Lampung	1. Hj. Nilla Nargis, SH. M.Hum 2. Sholihin, S.Pd.I, MH	Masyarakat Masyarakat
		3. Muhammad Tio Aliansyah, S.H., M.H. 4. Ali Sidik, S.Sos., M.IP.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Hermansyah, SH., MH 6. Karno Ahmad Satarya, S.Sos.I	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
11.	DKI Jakarta	1. Dahliah, S.Ag, MA 2. Dr. Sri Nuryanti	Masyarakat Masyarakat
		3. Muhaimin, S.H 4. Deti Kurniawati, S.E., M.H.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Burhanuddin, SE 6. Irwan Supriadi Rambe, S.IP., M.Han	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
12.	Banten	1. Dra. Hj. Enan Nadia 2. Drs. Solihin, M.Pd	Masyarakat Masyarakat
		3. Hj. Rohimah, S.Ag, M.H. 4. H. Agus Sutisna, S.IP., M.Si.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. N. Abdurosyid Sidiq, S. Ag 6. M. Nasehudin, M.Pd	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
13.	Jawa Barat	1. Drs. Harminus Koto, M.Ikom 2. Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H.	Masyarakat Masyarakat
		3. Drs. Undang Suryatna, M.Si. 4. Reza Alwan Sovnidar, S.H.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Yulianto, SH 6. Lolly Suhenty, S.Sos.I	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
14.	Jawa Tengah	1. Dr. Umbu Rauta, SH., M.H 2. Henry Wahyono, S.Pd	Masyarakat Masyarakat

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		3. M. Taufiqurrohman, S.T. 4. Muslim Aisha, S.H.I.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Sri Sumanta, SH 6. Anik Sholihatun, S.Ag., M.Pd	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
15.	Jawa Timur	1. Dr. Hananto Widodo, SH., MH 2. Dr. Abdul Chalik, MA	Masyarakat Masyarakat
		3. Muhammad Arbayanto, S.H., M.H. 4. Rochani, S.Pi., M.P.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Eka Rahmawati, S.Sos 6. Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
16.	D.I. Yogyakarta	1. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si. 2. Drs. Mohammad Najib, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Siti Ghoniyatun, S.H. 4. Ahmad Shidqi, S.Th.I., M.Hum.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Sutrisnowati, SH., MH., M.Psi 6. Agus Muhamad Yasin, S.Sos	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
17.	Bali	1. Ketut Udi Prayudi, SE. SH., MH 2. I Ketut Sunadra, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Anak Agung Gede Raka Nakula, S.H., M.H. 4. I Gede John Darmawan, S.H.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Ketut Ariyani, SE, MM 6. I Wayan Widyadana Putra, SE	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
18.	Nusa Tenggara Barat	1. Agus, M.Si 2. Prof. Dr. Drs. Syafruddin, M.S	Masyarakat Masyarakat
		3. Yan Marli, MMPd., M.Pd. 4. Agus Hilman, S.Sos., M.Si.	KPU Provinsi KPU Provinsi

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		5. Suhardi, S.IP., MH 6. Dr. Hj. Yuyun Nurul Azmi, S.Pt., MP	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
19.	Nusa Tenggara Timur	1. Mikhael Feka, SH., MH 2. Gadrida Rosdiana Dukana, SH., MH	Masyarakat Masyarakat
		3. Yeffri Amazia Galla, S.H. 4. Lodowyk Fredrik, S.T.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Jemris Fointuna, S.Pi 6. Thomas Mauritius Djawa, SH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
20.	Kalimantan Barat	1. Jumadi, S.Sos., M.Si., Ph.D 2. Umi Rifdiyawaty, SH	Masyarakat Masyarakat
		3. Mujiyo, S.Pd. 4. Lomon, S.Sos.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I 6. Mohamad, SH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
21.	Kalimantan Tengah	1. Dr. Siun Jarias, SH., MH 2. Dr. Hj Zainap Hartati., M.Ag	Masyarakat Masyarakat
		3. Wawan Wiraatmaja, S.T., M.Si. 4. Eko Wahyu Sulistiobudi, S.E.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Edi Winarno, S.Hut 6. Satriadi, S.E., M.AP	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
22.	Kalimantan Selatan	1. Dr. Mahyuni, M.AP 2. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, SH, M.Hum	Masyarakat Masyarakat
		3. Dr. H. Nur Zazin, M.A. 4. Edy Ariansyah, S.IP., M.Si.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Erna Kasypiah, S.Ag., M.Si. 6. Azhar Ridhanie, SHI., M.IP	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
23.	Kalimantan Timur	1. Dr. H. Muh. Jamal Amin, M.Si 2. Prof. Dr. Suhartono, SE, MM	Masyarakat Masyarakat
		3. Fahmi Idris, S.E. 4. Mukhasan Ajib, S.Sos, M.I.kom.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Muhammad Ramli, M.Si 6. Ebin Marwi, SH.I., MH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
24.	Kalimantan Utara	1. Dr. Yahya Ahmad Zein, SH., MH 2. Drs. Said Usman, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Drs. Gamaliel Hirung Ding, M.Si. 4. Haryadi Hamid, S.E., M.Sc.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Suryani, SE., M.Si 6. Fadliansyah, SH., MH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
25.	Gorontalo	1. Siti Haslina Said, SH., MH 2. Dr. Roy Marthen Moonti, SH., MH	Masyarakat Masyarakat
		3. Ramli Ondang Djau, M.Si. 4. Selvi Katili, S.E	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Rahmad Mohi, S.Sos. M.Si 6. Idris Usuli, S.Pd. M.AP	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
26.	Sulawesi Utara	1. Dr. Mayske Rinny Liando, S.Pd., M.Pd 2. Dra. Trilke Erita Tulung, M.Si	Masyarakat Masyarakat
		3. Meidy Yafeth Tinangon, S.Si., M.Si. 4. Salman Saelangi, S.Kel.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Herwyn J.H. Malonda, SH., M.Pd 6. Mustarin Humagi, S.Hi	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
27.	Sulawesi Barat	1. Ir. Rehang Mas'ud, M.Si 2. M. Danial	Masyarakat Masyarakat

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
		3. Farhanuddin, S.E., M.Si 4. Said Usman Umar, S.Pd.I.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Supardi Narno, S.Pd, M.Si 6. Usman, SH.I., MAP	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
28.	Sulawesi Tengah	1. Dr. Intam Kurnia, M.Si 2. Dr. Muh. Tavip, SH., MH	Masyarakat Masyarakat
		3. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H. 4. Naharudin, S.H., M.H.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Jamrin, SH, MH 6. Zatriawati, SE, MPWP	Bawalu Provinsi Bawalu Provinsi
29.	Sulawesi Tenggara	1. Prof. Dr. Ir. La Ode Safuan, M.P 2. Hidayatullah, S.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Ade Suerani, S.T. 4. Al Munardin, S.H.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Sitti Munadarma, SP 6. Munsir Salam, S.Pd, M.Si	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
30.	Sulawesi Selatan	1. Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si 2. Prof. Dr. Ma'ruf Hafidz, SH., MH	Masyarakat Masyarakat
		3. Dr. Upi Hastati, S.Ag., M.H. 4. Fatmawati, S.S., M.A.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Azri Yusuf, SH, MH 6. Amrayadi, SH.	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
31.	Maluku	1. Dr. Barnabas Dumas Manery, SH., MH 2. Efie Baadilla, SH., MH	Masyarakat Masyarakat
		3. Almudatsir Zain Sangadji, S.H. 4. Engelbertus Dumatubun, S.H.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Abdullah Ely, SH., MH 6. Thomas Tomalatu Wakano, SH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi

NO	PROVINSI	NAMA	UNSUR
32.	Maluku Utara	1. Rosita Alting, S.Ag., M.Ag 2. Dr. Nam Rumkel, S.Ag., MH	Masyarakat Masyarakat
		3. Mohtar Alting, S.H.I. 4. Safrina Rahma Kamaruddin, S.Pi.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Aslan Hasan, SH., MH 6. Hj. Masita Nawawi Gani, SH	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
33.	Papua	1. Fegie Y. Wattimena, ST., M.Kom 2. Dr. Yusak Elisa Reba, S.H., M.H	Masyarakat Masyarakat
		3. Fransiskus Antonius Letsoin, S.E 4. Zandra Mambrasar, S.H.	KPU Provinsi KPU Provinsi
		5. Abraham Ramandaei 6. Rionaldo Harold Parera, SE	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi
34.	Papua Barat	1. Oktofianus Orgenes Kambu, S.Sos 2. Napolion Fakdawer, S.Pd	Masyarakat Masyarakat
		3. Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si. 4. Niko Tunjanan, S.S	Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi

**DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
Pdt. KETUA,**



Prof. Dr. MUHAMMAD, S.IP., M.Si